



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Ueruru, 20 Agustus 1973 (47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Gililana, 15 Januari 1970 (51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti surat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2004 Pemohon I yang bernama **Pemohon I** menikah dengan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** di hadapan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 10 Agustus 2004;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung yang beridentitas:

Nama : **Anak Para Pemohon**
Tanggal Lahir : 02 Desember 2004 (16 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali;

Dengan calon istrinya :

Nama : **Calon Istri Anak Para Pemohon**
Tanggal Lahir : 06 Juni 2004 (16 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx dengan Surat Nomor Xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2021;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan organ reproduksi calon istri anak Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon berusia 16 tahun 02 bulan berstatus jejaka, sementara Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 07 bulan berstatus perawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Calon Istri Anak Para Pemohon, dan menjadi seorang suami/kepala rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun begitu juga dengan calon istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri/ibu rumah tangga dan saat ini anak Para Pemohon belum bekerja dan berjanji akan segera mencari pekerjaan dan sebelumnya beberapa kali membantu orang tuanya bekerja di kebun milik orangtuanya menanam kakao dan pala, sementara calon istri anak Para Pemohon juga dalam beberapa tahun terakhir sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas di rumah di antaranya memasak, merapikan rumah dan isinya untuk membantu meringankan tugas ibunya di rumah bahkan biasa membantu orang tuanya bekerja di kebun;
- Bahwa saat ini calon istri anak Para Pemohon (Calon Istri Anak Para Pemohon) sedang dalam keadaan hamil 3 bulan hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon);
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab Anak Para Pemohon dan orangtuanya telah melamar calon istri anak Para Pemohon (Calon Istri Anak Para Pemohon) bulan Januari 2021 lalu;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon bernama Nurlan bin Marten (ayah kandung calon istri anak Para Pemohon), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sebab orang tua calon istri anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan calon istri anak Para Pemohon (Calon Istri Anak Para

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) saat ini sedang dalam keadaan hamil 3 bulan hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon);

- Bahwa keinginan menikah Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon adalah keinginan keduanya sendiri, bukan atas dasar paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sudah bersikap dewasa dan bertanggung jawab, terbiasa membantu tugas-tugas ibunya merapikan dan membersihkan seisi rumah, memasak dan mencuci, serta membantu di kebun. Begitupun Anak Para Pemohon menurut orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah bersikap dewasa dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan/rujuk Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali atas nama Pemohon I, NIK. xxxxxx tertanggal 10 Juli 2020 dan Pemohon II NIK. xxxxxx tertanggal 01 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 dan P.3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I) Nomor: xxxxxx tertanggal 05 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali. Bukti surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 24 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali, tertanggal 10 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.7;
7. Fotokopi Surat Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Xxxxxx tertanggal 20 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I (Saksi I);** umur 35 tahun, agam Islam, pekerjaan Honorer xxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berumur 16 tahun 02 bulan, berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon yang sekarang berumur 16 tahun 07 bulan dan berstatus gadis;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang belum cukup umur;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga dan calon istri anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, dan saat ini anak Para Pemohon belum bekerja dan berjanji akan segera mencari pekerjaan dan saksi juga mendengar bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencarikan pekerjaan untuk anak Para Pemohon di daerah Xxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi menurut pengakuan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon (Calon Istri Anak Para Pemohon) sedang dalam keadaan hamil usia 3 bulan hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon);
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan saksi memandang bahwa keduanya sebaiknya segera dinikahkan karena orang tuanya tidak sanggup lagi mengontrol pergaulan anaknya dan khawatir anaknya melanggar norma agama dan syariat lebih jauh lagi apabila menunda-nunda pernikahannya;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) beserta orangtuanya telah melamar calon istri anak para pemohon (Calon Istri Anak Para Pemohon) pada bulan Januari 2021 lalu;
 - Bahwa setahu saksi keinginan menikah datang dari anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sendiri, dan tidak ada yang memaksa baik dari orang tua atau pun orang lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
2. **Saksi II (Saksi II);** umur 35 tahun, agam Islam, pekerjaan Honorer Dispora, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Ipar Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berumur 16 tahun 02 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon yang sekarang berumur 16 tahun 07 bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga dan calon istri anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, dan saat ini anak Para Pemohon belum bekerja dan berjanji akan segera mencari pekerjaan dan saksi juga mendengar bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencarikan pekerjaan untuk anak Para Pemohon di daerah Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon (Calon Istri Anak Para Pemohon) sedang dalam keadaan hamil usia 3 bulan hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon);
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan saksi memandang bahwa keduanya sebaiknya segera dinikahkan karena orang tuanya tidak sanggup lagi mengontrol pergaulan anaknya dan khawatir anaknya melanggar norma agama dan syariat lebih jauh lagi apabila menunda-nunda pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) beserta orangtuanya telah melamar calon istri anak para pemohon (Calon Istri Anak Para Pemohon) pada bulan Januari 2021 lalu;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keinginan menikah datang dari anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sendiri, dan tidak ada yang memaksa baik dari orang tua atau pun orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup"*, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun 02 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 16 tahun 07 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx berdasarkan surat Nomor XXXXXX, tanggal 26 Januari 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang berupa asli dan/atau fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (hazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dan fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, serta bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Xxxxxx, dengan demikian terbukti anak kandung Para Pemohon masih berusia 16

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 02 bulan, yang lahir tanggal 02 Desember 2004, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Anak Para Pemohon masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik berupa fotokopi Surat hasil Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas yang dikeluarkan oleh Dokter/Pengirim UPT Puskesmas Xxxxxx Kabupaten Morowali atas nama calon istri anak Para Pemohon. Dengan demikian terbukti bahwa calon istri Anak Para Pemohon pada saat dikeluarkannya surat keterangan tersebut dalam kondisi positif (hamil);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P.8, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : *Saksi I* dan *Saksi II* yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut dan telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg, 308 ayat (2) dan pasal 309 R.Bg, karenanya Hakim menilai keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon beserta orangtuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkannya anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali karena usia Anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun 02 bulan dan Calon Istri Anak Para Pemohon berumur 16 tahun 08 bulan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya pernah melakukan hubungan badan/intim sehingga sekarang calon istri anak Para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan dan Anak Para Pemohon (anak Para Pemohon) beserta Para Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Para Pemohon (calon istri Anak Para Pemohon) pada bulan Januari 2021 lalu;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon istrinya adalah datang dari keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah dan saat ini Anak Para Pemohon belum bekerja dan berjanji akan segera mencari pekerjaan dan Para Pemohon siap untuk membantu mencarikan pekerjaan untuk anak Para Pemohon di daerah Xxxxxxx;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan tugas-tugas rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci untuk membantu tugas ibunya di rumah bahkan biasa bantu orangtuanya bekerja di kebun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan serta anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 02 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat, sudah lama berpacaran dan sulit untuk dipisahkan serta calon istri anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungannya dengan anak Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon istrinya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *'aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, calon istri anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan tugas-tugas di rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci untuk membantu meringankan pekerjaan ibunya di rumah bahkan biasa bantu orangtuanya bekerja di kebun bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *'aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* Juz I halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah anak Para Pemohon, maka akan menutup pintu mudharat dan akan memberikan kemaslahatan bagi Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon istri anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya serta orang tua Calon istri Anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya serta orang tua Calon istri Anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua Calon istri Anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 14, 16 dan 17

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 287.000,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari *Senin*, tanggal *22 Februari 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *10 Rajab 1442 Hijriyah* oleh **Aris Saifudin, S.Sy.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Suad, S.Ag., S.HI

Hakim Tunggal,

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Buk